



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,  
Tlp. (0283) 491016 491761, Fax. 491016 Slawi 52419

Website: [www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id](http://www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id), E-mail: [kontak@rsudsoeselo.com](mailto:kontak@rsudsoeselo.com)



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

**BERITA ACARA**  
**UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**(DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN**  
**TEGAL TAHUN 2023**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat**, bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami masing-masing:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.AN	Direktur selaku Pengarah PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
2	dr. Titis Cahyaningsih, M.M.	Wakil Direktur Pelayanan selaku Pengarah PPID	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
3	Drs. Abdurokhman	Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
4	dr. Teguh Sukma Wibowo, M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
5	Luthful Hakim, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
6	Hermi Srimanti, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
7	Sri Harso Pamoro, S.K.M., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
8	Edi Pratono, S.E.	Kepala Bagian Keuangan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal
9	Dr. Joko Kurnianto, S.K.M., M.Kes.	Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal

Untuk selanjutnya telah melaksanakan:

1. Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023
2. Menyepakati Hasil Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang telah disusun Sebagaimana Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 002/PPID-PELAKSANA/I/2023.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik.

Dibuat di Slawi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL



ABDUROKHMANN

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 002/PPID-PELAKSANA/I/2023

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	<p>1. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”</b>.</p> <p>2. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: <b>“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan</b></p>	Pelaku usaha akan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat	Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha	1 (Satu) Tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah





		<p><i>informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.</i></p>			
2	<p>Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maupun masyarakat</p>	<p>1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</b> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4.</p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.</p>	<p>Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.</p>	<p>5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.</p>

		<p><i>membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum”.</i></p> <p>2. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: <b>“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban : a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</b></p>			
3	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	<p>Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b>“Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pasien dan tidak</b></p>	<p>Mengakibatkan Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Nyaris Cidera (KNC); dan</li> </ol>	<p>Petugas menjadi tidak ragu dan terbuka melaporkan insiden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Nyaris Cidera (KNC); dan</li> </ol>	<p>1 (Satu) Tahun atau sampai dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan baik (feedback) berupa rekomendasi Keselamatan pasien dalam</p>





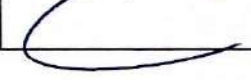
		<b>untuk menyalahkan orang (non blaming)". Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak".</b>	4. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan Pasien pada Rumah Sakit.	4. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.	rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di Rumah Sakit.
4	Pelaporan Insiden Yang Berkaitan Kejadian Sentinel	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b>"Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan"</b> .	Mengakibatkan terganggunya proses penanganan kejadian sentinel sehingga merugikan Pasien, Keluarga Pasien serta mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Membantu mengendalikan situasi serta untuk Mengamankan lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media massa serta menenangkan Pasien, Keluarga Pasien dan Tenaga Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.	1 (Satu) Tahun atau sampai dengan Tim Investigasi yang ditetapkan Direktur Jendral di Lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan penanganan kejadian sentinel bersama dengan Dinas Kesehatan.
5	Laporan Audit Medis	Pasal 17 huruf h, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2.</b>	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis dan menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang prima	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit	20 (Dua Puluh) Tahun atau sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum.

		<p><i>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal".</i></p>			
--	--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.AN	Direktur selaku Pengarah PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
2	dr. Titis Cahyaningsih, M.M.	Wakil Direktur Pelayanan selaku Pengarah PPID	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
3	Drs. Abdurokhman	Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku PPID Pelaksana	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
4	dr. Teguh Sukma Wibowo, M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	



5	Luthful Hakim, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
6	Hermi Srimanti, S.Kep.,Ns., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
7	Sri Harso Pamoro, S.K.M., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
8	Edi Pramono, S.E.	Kepala Bagian Keuangan	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	
9	Dr. Joko Kurnianto, S.K.M., M.Kes.	Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang	RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Soeselo Kabupaten Tegal,



dr. Guntur Muhammad Tagwin, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700309 200312 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa mendasari Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yang dikecualikan PPID Pelaksana Kabupaten Tegal Nomor 002/PPID-PELAKSANA/I/2023 yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal tentang Persetujuan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yng dikecualikan PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 002/PPID-PELAKSANA/I/2023 yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan dan menyetujui Hasil Uji Konsekuensi sebagaimana Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yang dikecualikan PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal Nomor 002/PPID-PELAKSANA/I/2023 yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2023.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 4 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL

  
GUNYUR HUSAMMAD TAQWIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa mendasari Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi yang dikecualikan, wajib melakukan pengujian konsekuensi;
  - b. bahwa mendasari Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yang dikecualikan PPID Pelaksana Kabupaten Tegal Nomor 002/PPID-PELAKSANA/I/2023 yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2023 dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persetujuan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualian (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakit;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;
  15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;



17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yng dikecualikan PPID Pelaksana Kabupaten Tegal Nomor 002/PPID-PELAKSANA/I/2023 yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 4 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL.



ABDUROKHMAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	3. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b><i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak</i></b>	Pelaku usaha akan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat	Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha	1 (Satu) Tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden

		<p><b>sehat”.</b></p> <p>4. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: <b>“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.</b></p>			<p>Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>
2	<p>Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maupun masyarakat</p>	<p>3. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban</b></p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.</p>	<p>Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.</p>	<p>5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.</p>

		<p><i>yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum”.</i></p> <p>4. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: <b>“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban : a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</b></p>			
--	--	---	--	--	--

3	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	<p>Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b>“Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)”</b>.  <b>Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak”</b>.</p>	<p>Mengakibatkan Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Nyaris Cidera (KNC); dan</li> <li>4. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).</li> </ol> <p>sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan Pasien pada Rumah Sakit.</p>	<p>Petugas menjadi tidak ragu dan terbuka melaporkan insiden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Nyaris Cidera (KNC); dan</li> <li>4. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).</li> </ol> <p>sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.</p>	<p>1 (Satu) Tahun atau sampai dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan baik (feedback) berupa rekomendasi Keselamatan pasien dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di Rumah Sakit.</p>
---	--------------------------------------	--	--	---	--

4	Pelaporan Insiden Yang Berkaitan Kejadian Sentinel	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b>“Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan”</b> .	Mengakibatkan terganggunya proses penanganan kejadian sentinel sehingga merugikan Pasien, Keluarga Pasien serta mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Membantu mengendalikan situasi serta untuk Mengamankan lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media massa serta menenangkan Pasien, Keluarga Pasien dan Tenaga Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.	1 (Satu) Tahun atau sampai dengan Tim Investigasi yang ditetapkan Direktur Jendral di Lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan penanganan kejadian sentinel bersama dengan Dinas Kesehatan.
5	Laporan Audit Medis	Pasal 17 huruf h, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan</b>	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis dan menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang prima	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit	20 (Dua Puluh) Tahun atau sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum.

		<i>seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal".</i>			
--	--	---	--	--	--

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL.



ABDUROKHMAN